

EVALUASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA WRINGINPUTIH KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI

Silfiya Fatimatuz Zuhro¹, Nurul Umi Ati², Retno Wulan Sekarsari³

*Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
Email : silfiyafatimahtuzzuhro@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Evaluasi kebijakan pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. penelitian ini didasarkan permasalahan terkait dengan evaluasi kebijakan pembangunan berkelanjutan terhadap masyarakat. Pembangunan berkelanjutan merupakan paradigma pembangunan yang berkaitan langsung dengan keseimbangan alam atau lingkungan. Serta kebijakan pembangunan berkelanjutan terhadap lingkungan, dalam pembangunan berguna untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi saat ini dan dimasa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data collection, data condensatoin, data display, dan conclusion. Peniliti menggunakan trigulasi sumber dan trigulasi teknik guna memastikan keabsahan data penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) berdasarkan tahapan evaluasi kebijakan pembangunan berkelanjutan masih terdapat ketidaksesuaian dalam kebijakan yang ada, dikarenakan yang terealisasi dalam pembangunan hanya satu Dusun saja. (2) beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pembangunan berkelanjutan di Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

Kata Kunci : Evaluasi; Pembangunan Berkelanjutan; Kesejahteraan Masyarakat

Pendahuluan

Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya. Menurut Manik 2017 bahwa Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung. Dengan peran yang sangat penting ini, maka kerusakan lingkungan hidup yang terjadi merupakan hal yang serius. Lingkungan hidup juga merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup, yakni pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Maka dari itu dalam perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup terdapat adanya suatu pembangunan. Menurut Siagian Pembangunan merupakan “usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang merencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Secara umum, dapat diketahui makna tentang pembangunan sebagai suatu proses perencanaan (*Social Plan*) yang dilakukan oleh suatu organisasi di instansi pemerintahan dalam perencanaan pembangunan untuk membuat

perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan paradigma pembangunan yang berkaitan langsung dengan keseimbangan alam atau lingkungan. Serta kebijakan pembangunan berkelanjutan terhadap lingkungan masyarakat Desa Wringinputih merupakan kebijakan yang perlu diterapkan, agar kelestarian asri dari lingkungan Desa Wringinputih terjaga dan kesehatanpun juga terjaga.

Evaluasi merupakan penilaian terhadap suatu persoalan yang umumnya menunjukkan baik dan buruknya persoalan tersebut. Dalam kaitannya dengan suatu program biasanya evaluasi dilakukan dalam rangka mengukur efek suatu program dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Menurut Muhadjir Joko Widodo (2008:112) Evaluasi Kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai upaya analisis nilai dari fakta-fakta kebijakan. Jika monitoring merupakan prosedur analisis untuk menghasilkan informasi objektif tentang sebab dan akibat kebijakan program, maka evaluasi merupakan produksi informasi tentang nilai atau harga keluaran (*output*) kebijakan. Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target

kebijakan publik yang ditentukan. Evaluasi kebijakan publik tidak hanya untuk melihat hasil (*outcomes*) atau dampak (*impacts*), akan tetapi dapat pula untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan suatu kebijakan telah dilaksanakan. Dengan kata lain, evaluasi dapat digunakan untuk melihat apakah proses pelaksanaan suatu kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditentukan.

Sesuai dengan hasil peneliti di lokasi penelitian tepatnya di Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Peneliti menemukan indikasi bahwa evaluasi kebijakan pembangunan berkelanjutan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Wringinputih sangat diperlukan. Hal ini disebabkan oleh beberapa akar permasalahan yang ada diantaranya :

1. Tidak adanya pembuangan akhir untuk menampung sampah masyarakat, sehingga mengakibatkan adanya penumpukan sampah di saluran air sehingga menyebabkan penyumbatan terhadap saluran tersebut.
2. Dikarenakan curah hujan yang cukup tinggi dan tidak adanya saluran air yang dapat menyalurkan air dari daratan menuju ke laut atau sering di sebut dengan (drainase) sehingga berpotensi mengakibatkan banjir. Serta menyempitnya Saluran drainase yang dulu pernah di buat dalam keadaan tanah, dan sejumlah banjir juga disebabkan luapan air perswahan, mengecilnya sejumlah sungai dan bangunan liar.
3. sering terjadi banjir yang melanda desa wiringin putih yang berpotensi merusak rumah serta lingkungan dan tempat mata pencaharian masyarakat setempat menjadi berhenti, serta menyebabkan kerusakan lingkungan masyarakat.

Maka dari itu, dengan adanya 3 (tiga) faktor permasalahan diatas. Pemerintah Desa Wringinputih melakukan program evaluasi kebijakan pembangunan berkelanjutan terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Bagaimana Evaluasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi dan untuk mengetahui apa yang menjadi faktor pendorong dan faktor penghambat dalam evaluasi kebijakan pembangunan berkelanjutan terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan pokok-pokok pikiran tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan harapan untuk memeberikan sumbangsih baik secara keilmuan maupun praktek dengan harapan

pembangunan berkelanjutan ini dapat mensejahterkan masyarakat di Desa Wringinputih baik dari segi ekonomi dan sosial.untuk memperoleh pemahaman yang sama, pada kajian ini memberikan beberapa konseptualisasi yang berhubungan dengan masalah penelitian. Tujuannya adalah agar semua dapat menemukan kata kunci yang sesuai dengan format kajian sebagai ruang lingkup atau batasan penelitian ini.

Tinjauan Pustaka

Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan

Evaluasi merupakan penilaian terhadap suatu persoalan yang umumnya menunjukkan baik dan buruknya persoalan tersebut. Dalam kaitannya dengan suatu program biasanya evaluasi dilakukan dalam rangka mengukur efek suatu program dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Sementara Widodo (2008), yang mengutip pendapat Jones, menjelaskan bahwa evaluasi sebagai, "suatu kegiatan yang dirancang untuk menilai manfaat bervariasi dalam spesifikasi objek, teknik pengukuran, dan metode analisi." Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu aktivitas yang dirancang untuk menilai hasil-hasil kebijakan pemerintah yang mempunyai perbedaan-perbedaan yang sangat penting dalam spesifikasi obyeknya, teknik-teknik pengukurannya, dan metode analisisnya. Evaluasi kebijakan pada dasarnya adalah suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan yang ditentukan

Kebijakan merupakan tindakan, tujuan dan pernyataan pemerintah tentang masalah tertentu, langkah-langkah yang mereka ambil (atau gagal ambil) untuk mengimplementasikannya, dan penjelasan yang mereka berikan untuk apa yang terjadi (atau tidak terjadi) (atau tindakan, objektif, dan pernyataan pemerintah pada hal-hal tertentu, langkah-langkah yang mereka ambil (atau gagal dalam pengambilan keputusan) untuk melaksanakannya, dan penjelasan mereka berikan untuk apa yang terjadi (atau tidak terjadi). Sedangkan Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Pembangunan juga sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan merupakan proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu sistem yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Pembangunan berkelanjutan perlu dipahami lebih komprehensif dengan melihat bagaimana hubungan dan intraksi antara indikator

dalam masing-masing dimensi maupun antar dimensi. Interaksi antar indikator dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, dapat dilihat dengan menggunakan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif.

Suryono (2010:21) mengatakan bahwa sustainability diartikan sebagai suatu pembangunan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa merugikan kebutuhan generasi masa datang. Dalam pembangunan berkelanjutan terdapat beberapa konsep pembangunan berkelanjutan yang merupakan penghubung antara pembangunan ekonomi, kualitas lingkungan dan kesetaraan sosial. Dalam beberapa konsep itu ialah :

- a. Ekonomi, yaitu memaksimalkan pendapatan dengan mempertahankan atau meningkatkan cadangan kapital.
- b. Ekologi, yaitu menjaga dan mempertahankan sistem fisik dan biologis.
- c. Sosial budaya, yaitu menjaga stabilitas dari sistem sosial dan budaya.

Maka dari itu, Pembangunan berkelanjutan di Desa Wringinputi Kec. Muncar Kab. Banyuwangi pada dasarnya mencakup tiga dimensi yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam dimensi ekonomi terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai antara lain upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memerangi kemiskinan, serta mengubah produksi dan konsumsi ke arah yang seimbang. Sedangkan dimensi sosial berhubungan dengan pemecahan masalah kependudukan, perbaikan pelayanan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, dan lain-lain. Adapun dimensi lingkungan memiliki tujuan-tujuan antara lain upaya untuk mensejahterakan masyarakat, melestarikan lingkungan masyarakat untuk masa yang akan datang, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia.

Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat pada dasarnya mengacu tujuan dari sila ke-lima Pancasila yang lebih menekankan pada prinsip keadilan sosial dan secara eksplisit konstitusinya pada pasal 27 dan 34 UUD 1945 yang mengamanatkan tanggungjawab pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, amanat konstitusi tersebut belum sepenuhnya dipraktekkan secara konsekuen baik pada masa orde baru maupun era reformasi saat ini. kesejahteraan sosial adalah kondisi sejahtera dari suatu masyarakat yang meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat. kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan sejahtera secara sosial tersusun atas tiga unsur yaitu: pertama, setinggi apa masalah sosial dikendalikan; Kedua, seluas apa kebutuhan dipenuhi, dan Ketiga, setinggi apa kesempatan bagi individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat.

Hal ini terdapat strategi kesejahteraan masyarakat menurut Nilasari (2014: 2) yang

menyimpulkan bahwa strategi merupakan sejumlah tindakan yang terintegrasi dan terkoordinasi yang diambil untuk mengeksploitasi kompetensi inti serta memperoleh keunggulan bersaing. Kegiatan yang terintegrasi dan terkoordinasi merupakan kegiatan kreatif tanpa akhir dari sumber daya manusia untuk mendapatkan daya ungkit sumber daya (*resource leverage*) yang lebih baik. Sedangkan mengeksploitasi kompetensi inti dimaksudkan atas penggunaan segala daya pengetahuan, keterampilan, pengalaman dari para pelaksana atau teamwork untuk keseluruhan tindakan yang diterapkan untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam kaitannya dengan tujuan negara untuk mensejahterakan masyarakatnya, maka strategi harus dipersiapkan dengan baik dengan berbagai indikator yang dipastikan mampu mensejahterakan masyarakat. Arsyad dkk (2011: 27) menguraikan 2 (Dua) indikator prasyarat untuk memecahkan permasalahan pembangunan di pedesaan, yaitu :

1. Infrastruktur (fisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan)
2. Tingkat industrialisasi

Masing-masing indikator pembangunan tersebut, memerlukan strategi yang tepat untuk mewujudkan, yang keseluruhannya bermuara kepada pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Metode Penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif menurut Bodgan dan Taylor dalam Moleong peneliti yang menghasilkan penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang atau perilaku yang dapat diamati (Moleong dan Lexy, 2016). Menurut Miles, Huberman dan Saldana mendefinisikan bahwasanya aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktifitas dalam analisis meliputi reduksi data (data reduktif), penyajian data (data display), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Conclusion drawing/verification). (Miles Huberman dan Sadana, 2014:16).

Peneliti ini melakukan wawancara dengan melakukan beberapa kali kunjungan kelokasi penelitian untuk mengumpulkan data, melakukan observasi mencari informasi secara bertahap hingga tidak mendapatkan informasi baru. Maka dari itu, peneliti mendiskripsikan dalam penelitiannya dengan menerangkan, mengarahkan dan melukiskan suatu realitas sosial yang kompleks untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat.

Pembahasan

A. Evaluasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi

Kebijakan pembangunan berkelanjutan di Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi telah diatur berdasarkan SK Kepala Desa Nomor :188/11/KEP/429.511.07/2022 Tanggal 07 Maret 2022 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Tahun 2022 di Bidang Pembangunan. Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat Desa Wringinputih. Namun, dalam rangka mengetahui tingkat kesejahteraan di Desa Wringinputih sebagaimana arahan kebijakan pembangunan berkelanjutan di Desa Wringinputih serta beberapa masalah yang terjadi perlu adanya evaluasi kebijakan. Melalui evaluasi kebijakan dapat diketahui dampak dari pembangunan berkelanjutan dapat mensejahterakan masyarakat Desa Wringinputih atau tidak. Serta dapat terealisasi dalam adanya evaluasi kebijakan pembangunan berkelanjutan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Wringinputih.

Berdasarkan hasil temuan-temuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, proses evaluasi kebijakan pembangunan berkelanjutan di Desa Wringinputih Kecamatan Muncar dapat ditinjau dengan menggunakan model evaluasi praktis. Menurut Edward A. Suchman dikutip Winamo (2002: 169) yang bukunya berjudul *Teori Dan Proses Kebijakan Publik* terdapat 4 (empat) langkah dalam evaluasi kebijakan yaitu :

1. Mengidentifikasi Tujuan Program Yang Akan Di Evaluasi

Evaluasi adalah bagian dari suatu penelitian. Evaluasi juga merupakan proses pengumpulan data untuk menentukan sejauhmana dalam hal apa, dan bagaimana tujuan program dapat tercapai. Program merupakan suatu rencana yang melibatkan berbagai unit yang berisikan kebijakan serta rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Tujuan program itu sendiri ingin mengetahui sesuai kondisi, maka evaluasi program dapat dikatakan merupakan salah satu bentuk penelitian evaluatif.

Selanjutnya dalam identifikasi tujuan program yang akan dievaluasi adalah kebijakan dalam

pembangunan/normalisasi saluran air di Desa Wringinputih yang bertujuan agar lingkungan masyarakat terhindar dari genangan air(banjir) serta perekonomian masyarakat stabil kembali. Namun, adanya pembangunan yang belum terealisasi masyarakat Desa Wringinputi yang ada di Dusun Krajan dan Dusun Tegalpare masih belum ada kesejahteraannya. Maka dari itu, perlu diidentifikasi tujuan program evaluasi kebijakan pembangunan berkelanjutan ini dapat membuat kesejahteraan masyarakat Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

2. Analisis Terhadap Masalah

Pada model praktis ini pemerintah Desa Wringinputih menganalisis terhadap masalah yang ada di masyarakat Desa Wringinputih. Yaitu Apa masalah yang sering di masyarakat Desa Wringinputih dan bagaimana kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah Desa Wringinputih. Serta Masalah keluhan saluran air yang ada sebagai tahap evaluasi kebijakan pembangunan berkelanjutan bagi Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Evaluasi kebijakan pembangunan berkelanjutan dibuat agar kesejahteraan masyarakat Desa Wringinputih terjamin.

3. Pengukuran Terhadap Tingkatan Perubahan Yang Terjadi

Pada pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi dalam evaluasi kebijakan pembangunan berkelanjutan di Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi ini belum terlihat ada tingkatan perubahan. Yang di karenakan kendala dana yang kurang maksimal. Serta masih tahap penentuan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan pembangunan yang dulu awal tahun 2020 atau karena penyebab yang lain. Maka, perlunya pengukuran tingkat perubahan yang terjadi harus tetap adanya evaluasi kebijakan dari pihak pemerintah Desa Wringinputih.

4. Menentukan Apakah Perubahan Yang Diamati Merupakan Akibat Dari Kegiatan Tersebut Atau Karena Penyebab Yang Lain

Evaluasi kebijakan pembangunan berkelanjutan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Wringinputih ini masih menjadi penentuan apakah perubahan yang diamati dalam pembangunan normalisasi aliran air apakah ada akibat dari kegiatan bagi masyarakat Desa Wringinputi. Dalam evaluasi kebijakan pembangunan berkelanjutan penyebab yang lain pasti ada, salah satunya adalah normalisasi aliran air pada tahun 2020 yang hanya galian tanah saja dan tidak adanya pembuangan sampah di berbagai Dusun warga Desa Wringinputih. Maka dari itu, sudah jelas perubahan yang diamati oleh pihak pemerintah Desa Wringinputih sangatlah membantu akan kesejahteraan masyarakat Desa Wringinputih.

B. Faktor Pendukung Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi

Pada proses pembangunan berkelanjutan sebagaimana rencana dan arahan kebijakan yang ada, memiliki beberapa faktor pendukung dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, diantaranya ialah : Faktor pendukung secara internal dan faktor pendukung secara eksternal.

Pada faktor pendukung internal dikarenakan kondisi alam, kondisi lingkungan, dan kebutuhan masyarakat yang disebabkan adanya banjir yang tidak diinginkan. Maka dari itu pihak pemerintah Desa Wringinputih mengeluarkan kebijakan program pembangunan berkelanjutan terhadap normalisasi saluran air Desa Wringinputih. Sedangkan faktor pendukung eksternal tidak adanya kebutuhan masyarakat. Dalam maksud karena faktor eksternal itu menyangkut dalam keadaan yang diluar, sebab masalah yang tidak menyangkut kemanusiaan. Salah satu contoh dari faktor pendukung secara eksternal adalah bencana banjir di lingkungan masyarakat Desa Wringinputih.

Dampak pendukung kebijak pembangunan berkelanjutan yang secara internal dan eksternal dalam pembangunan berkelanjutan ialah masyarakat dapat merasakan kesejahteraan terhadap evaluasi kebijakan pemabngunan berkelanjutan. Walaupun semua dalam pembangunan normalisasi saluran air ada yang belum

terrealisasikan. Masyarakat berharap adanya evaluasi kebijakan dari faktor pendukung pembangunan berkelanjutan ini dapat terealisasi semuanya.

C. Faktor Penghambat Evaluasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi

Faktor penghambat dari evaluasi kebijakan pembangunan di desa wiringinputih ini ialah dari segi ekonomi dan sosil bagi masyarakat sekitar, hal ini di sebabkan oleh pembangunan yang tidak merata di Kecamatan Muncar khususnya Desa Wiringinputih sehingga berdampak pada sektor perekonomian masyarakat yang menurun dari tahun ketahun. Sehingga banyak dari sebagian besar masyarakat tidak merasakan dampak dari pembangunan berkelanjutan tersebut dari segi ekonomi.

Sedangkan faktor penghambat pembangunan bekelanjutan dari segi sosial, banyak masyarakat yang merasakan kurang efektifnya dalam pembangunan di karenakan pembangunan yang tidak merata sehingga aktifitas sehari hari masyakat sekitar menjadi terganggu, contohnya saat terjadi curah hujan yang sangat deras membuat becek jalanan yang masih belum di bangun sehingga masyarakat yang terdampak langsung mengalami kesulitan saat akan bepergian dan saat hendak mengantarkan anaknya sekolah.

Pembangunan yang di agendakan oleh pemerintah hanya terealisasi 50 % dari beberapa titik yang di tuju contohnya di desa Wiringinputih hanya terealisasi penggalian saluran air sedangkan jalan bekas galian di biarkan begitu saja, saat terjadi hujan mengakibatkan jalanan becek dan susah untuk di lalui masyarakat sekitar. Sedangkan Pembangunan berkelanjutan yang terealisasi 100% hanya terjadi di Dusun Kabatmantren.

Dari pemaparan di atas masyarakat sekitar berharap dengan adanya evaluasi pembangunan berkelanjutan bisa ditindak lanjuti agar masyarakat di Kecamatan Muncar merasakan kesejahtraan dari pembangunan tersebut. Hal ini juga yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Kecamatan Muncar khususnya Desa Wiringinputih yang sebagian besar masyarakat berharap pembangunan yang sudah di agendakan bisa terealisasi dengan baik.

Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diketahui evaluasi kebijakan dapat menggunakan model evaluasi

secara praktis yaitu mengidentifikasi tujuan program yang akan di evaluasi, evaluasi analisis terhadap masalah, evaluasi pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi, evaluasi menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain.

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembahasan diatas bahwa penerapan kebijakan pembangunan berkelanjutan di Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi masih terdapat tidak kesesuaian sebagaimana arahan pembangunan berkelanjutan yang ada di dalam SK Kepala Desa Nomor :188/11/KEP/429.511.07/2022 Tanggal 07 Maret 2022 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Tahun 2022 di Bidang Pembangunan terhadap kondisi aktual yang terjadi dilapangan.

Melalui evaluasi kebijakan dapat diketahui dampak dari pembangunan berkelanjutan dapat mensejahterakan masyarakat Desa Wringinputih. Serta faktor pendukung dan penghambat bisa terselesaikan dengan cara evaluasi kebijakan pembangunan berkelanjutan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln, dkk. 2011. *Strategi Pembangunan Pedesaan Berbasis Lokal*.Yoguakarta: UPP STIM YKPN
- Manik, K. E. S. 2007. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Muhadjir Joko Widodo.2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Bayumedia.hal.112
- Moleong, Lexy. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Rosdakarya
- Miles, M.B dan A.M Huberman. 2014. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press
- Nilasari, Senja. 2004. *Manajemen Strategi*. Jakarta: Dunia Cerdas
- Suryono, A. (2010). *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang :UB Press. hal 46.

Undang-Undang :

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup